

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perubahan iklim memberikan dampak yang signifikan bagi negara-negara di wilayah Pasifik Selatan. Pasalnya, berdasarkan pemantauan dari satelit, didapati bahwa permukaan air laut wilayah Pasifik mengalami kenaikan sebanyak 3-6mm per tahun selama periode 1993 sampai dengan 2017 (Oakes et al., 2017). Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *The Pacific Climate Change Science Programme* (PCCSP), kepulauan Pasifik diperkirakan akan mengalami kenaikan air laut yang sangat signifikan pada tahun 2080-2099, yaitu sekitar 0,18 sampai dengan 0,59 meter (Oakes et al., 2017). Hal ini membuat wilayah Kepulauan Pasifik menjadi sangat rentan.

Selandia Baru sebagai salah satu negara maju di wilayah Pasifik menunjukkan peran aktifnya dalam isu krisis perubahan iklim utamanya pada masa pemerintahan Perdana Menteri Jacinda Ardern. Dibandingkan dengan rezim sebelumnya, pemerintahan Perdana Menteri Jacinda Ardern cukup ambisius dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait dengan krisis perubahan iklim baik itu dalam skala nasional maupun internasional. Sebagai bukti, pada saat kampanye tahun 2017, Ardern menyatakan bahwa isu perubahan iklim merupakan isu krusial yang ia sebut dengan istilah “*my generation’s nuclear free moment*” (Gower, 2017).

Pada tahun 2019, Selandia Baru mengeluarkan undang-undang terkait dengan penggunaan karbon bernama *Climate Change Response (Zero Carbon) Amendment Act 2019* yang bertujuan untuk mengurangi emisi metana 24-47 persen di bawah tahun 2017 pada tahun 2050 (Ministry for the Environment, 2019). Kebijakan ini membuat Selandia Baru selangkah lebih maju daripada Australia dalam perannya mengenai krisis perubahan iklim di Pasifik (Mazengarb, 2019). Belum lagi, posisi Australia yang cukup problematik di Pasifik karena karena memaksa para pemimpin di *Pacific Islands Forum* (PIF) untuk melonggarkan peraturan mengenai pengurangan emisi karbon dan industri batu bara (Doran, 2019).

Saat terpilih sebagai Perdana Menteri Selandia Baru, kebijakan progresif Jacinda Ardern terkait lingkungan mulai diimplementasikan. Salah satu wacana kebijakan yang ditawarkan pada tahun 2017 adalah “*an experimental visa*” atau “*climate refugee visa*” untuk penduduk Pasifik yang terkena dampak dari perubahan iklim (Godin, 2020). Rencana ini kemudian menuai pujian dari dunia internasional. Sebagai sebuah negara yang sebelumnya menolak mengenai status pengungsi perubahan iklim, Selandia Baru dianggap memberikan sebuah gebrakan baru. Pasalnya, Sejak tahun 2011, sudah ada 11 kasus terkait dengan klaim status sebagai *climate refugee* atau klaim pengungsi perubahan iklim yang ditolak oleh otoritas Selandia Baru (Walters, 2019a).

Kendati kebijakan ini batal untuk diimplementasikan, hal itu bukan berarti peran Selandia Baru absen dalam isu krisis perubahan iklim di Pasifik. Selandia Baru meningkatkan alokasi dananya sebesar \$300 untuk krisis iklim secara global

yang mana setengahnya dikhususkan untuk membantu proses mitigasi dan adaptasi isu krisis perubahan iklim di wilayah Pasifik (New Zealand Government, 2019). Dalam *New Zealand's Pacific and Development Plan 2019-2022*, Selandia Baru berkomitmen untuk aktif dalam menangani isu krisis perubahan iklim di Pasifik. Komitmen ini juga ditandai dengan kehadiran Ardern dalam pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan di negara-negara Pasifik, penekanannya pada *Boe Agreement* dan perumusan kebijakan *Pacific Reset* (New Zealand Government, 2019).

Peran aktif ini kontras dengan posisi Selandia Baru pada masa pemerintahan Perdana Menteri Bill English. Walau pada pemerintahan English tidak sepenuhnya anti pada perubahan iklim, tetapi pemerintahan sebelumnya tidak mengeluarkan kebijakan apapun berkaitan dengan perubahan iklim. Sebagai bukti, kabinet English memutuskan untuk tidak melegitimasi undang-undang terkait pembatasan karbon di Selandia Baru (Grievesson, 2017). Saat diwawancara pada salah satu media Selandia Baru bernama RNZ dalam program *Morning Report* di tahun 2017, English menyatakan bahwa sebagian besar orang-orang Selandia Baru tidak peduli dengan isu perubahan iklim dan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan agenda politik elit (Morning Report, 2017).

Pandangan English sempat dikritik pada tahun 2013 saat ia menjabat menjadi Menteri Keuangan saat ditanya mengenai perubahan iklim, awalnya English tidak tegas dalam menjawab penyebab dari perubahan iklim, ia menyatakan bahwa beberapa orang memiliki pandangan ekstrim mengenai perubahan iklim yang justru membuat kemunduran ekonomi (Otago Daily Times Online News, 2017). Saat menjabat menjadi perdana Menteri, ia kemudian menyatakan posisinya

dalam isu perubahan iklim dimana ia percaya bahwa manusia turut berkontribusi di dalamnya (O'Brien, 2017b). Namun, English berpandangan bahwa posisi Selandia Baru cukup moderat dalam menanggapi isu perubahan iklim dengan posisinya yang menandatangani Perjanjian Paris. Selain itu, pemerintahan Bill English dan John Key (Partai Nasional) juga tidak mengeluarkan kebijakan apapun terkait isu lingkungan sehingga hal tersebut cukup kontras dengan Selandia Baru di masa pemerintahan Jacinda Ardern.

Lantas, peran aktif Selandia Baru dalam menangani isu krisis perubahan iklim di wilayah Pasifik ini menarik untuk diteliti karena adanya perubahan kebijakan dengan rezim sebelumnya. Belum lagi, absennya peran Australia dalam menangani krisis perubahan iklim di Pasifik membuat Selandia Baru semakin aktif dalam kerjasama regionalnya bersama negara Pasifik. Tulisan ini ingin meneliti mengapa Selandia Baru berperan aktif pada isu krisis perubahan iklim di Pasifik di bawah pemerintahan Perdana Menteri Jacinda Ardern dengan menggunakan kerangka berpikir teori peran ide dan gagasan dalam kebijakan luar negeri.

Jacinda Ardern menjadi unit analisis dalam penelitian ini dikarenakan ia secara vokal menyuarakan pentingnya isu lingkungan sejak kampanyenya menjadi Perdana Menteri. Selain itu, kepemimpinan Jacinda Ardern di Selandia Baru menjadi sorotan dunia internasional selain karena ia adalah perdana Menteri termuda yang pernah menjabat, ia juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan progresif bagi Selandia Baru, salah satunya dalam isu lingkungan. Sehingga menarik untuk meneliti dari unit terkecil yaitu individu pengambil kebijakan dalam mengkaji fenomena ini.

Selain itu, tulisan ini juga berusaha untuk mengisi kekosongan penelitian sebelumnya. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Almira Ulimaz Kamka membahas mengenai sekuritisasi dan upaya perlindungan status *climate refugee* Selandia Baru pada masa pemerintahan Jacinda Ardern. Tulisan ini menyatakan bahwa status *climate refugee* menjadi sebuah masalah keamanan di Selandia Baru yang membuat Jacinda Ardern meningkatkan perlindungan pada status pengungsi perubahan iklim Pasifik di Selandia Baru (Kamka, 2020). Sayangnya tulisan ini justru menggunakan teori sekuritisasi, padahal status *climate refugee* dan isu keamanan sendiri sebenarnya merupakan ancaman nyata dan masalah keamanan yang tidak perlu dikonstruksi menggunakan penggunaan bahasa. Melalui kekosongan tersebut, penulis menawarkan cara pandang baru mengenai kebijakan Selandia Baru terhadap perubahan iklim, bukan hanya sekadar kebijakan *climate refugee* saja tetapi peran aktif Selandia Baru menggunakan kerangka teori perubahan kebijakan luar negeri yang mana ide dan gagasan dari Jacinda Ardern berperan penting dalam membentuk kebijakan tersebut.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Simon Mark, menjelaskan mengenai bagaimana perubahan gaya diplomasi publik Selandia Baru terhadap negara-negara di Pasifik Selatan pada masa pemerintahan Jacinda Ardern melalui kebijakan *Pacific Reset* (Mark, 2021). Perbedaannya dengan penelitian ini adalah, Simon Mark menjelaskan bahwa perubahan kebijakan Selandia Baru menjadi lebih dekat dengan Pasifik Selatan disebabkan oleh adanya pengaruh domestik dan nilai yang dimiliki oleh Selandia Baru, sedangkan penelitian ini hanya akan meneliti secara spesifik mengenai peran Selandia Baru di Pasifik pada isu perubahan iklim yang

disebabkan oleh adanya gagasan dan cara pandang Jacinda Ardern mengenai isu perubahan iklim di Pasifik.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah mengapa Selandia Baru berperan aktif dalam menangani krisis perubahan iklim di Pasifik Selatan pada masa pemerintahan Perdana Menteri Jacinda Ardern?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai fenomena dan penyebab perubahan kebijakan luar negeri Selandia Baru dalam krisis perubahan iklim di Pasifik Selatan pada masa pemerintahan Jacinda Ardern menggunakan teori peran ide dan gagasan dalam kebijakan luar negeri.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kontribusi dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu kegunaan teoritis dan praktis dengan penjabaran sebagai berikut:

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Menambah sumber kekayaan ilmiah dari kajian ilmu hubungan internasional utamanya dalam menganalisa perubahan kebijakan luar negeri Selandia Baru menggunakan teori peran gagasan dan ide terkait dengan isu lingkungan.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Menjadi salah satu sumber acuan dalam pengambilan kebijakan luar negeri melalui peran gagasan utamanya berkaitan dengan perubahan iklim di tingkat global dan regional.

## **1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis**

Dalam perumusan kebijakan luar negeri, pemimpin memiliki kemampuan untuk mendefinisikan dan menginterpretasikan masalah internasional dan domestik sehingga dapat merencanakan strategi dan orientasi dari negaranya (M. G. Hermann & Hagan, 1998:126). Konteks kebijakan luar negeri juga berkaitan dengan beberapa hal penting seperti karakteristik individu (pemimpin) serta karakteristik nasional dan sosial (Hudson & Vore, 1995:226). Analisa kebijakan luar negeri mulai memasukkan unsur politik internasional dan perilaku individu ataupun kolektif dalam menghasilkan produk kebijakan luar negeri sebagai salah satu unit analisis (Hudson & Vore, 1995:210).

Konsep ide dan gagasan muncul sebagai bentuk alternatif lain dari realitas material dalam kerangka teori yang umumnya digunakan pada analisis fenomena Hubungan Internasional tahun 1990-an (Bilad, 2011:68). Pandangan ini berusaha untuk menjelaskan dinamika hubungan internasional di luar pemikiran para realis dan liberalis. Peran ide dan gagasan mulai digunakan dalam analisis kebijakan luar negeri. Konsep ini muncul menjadi kerangka teori konstruktivisme dimana politik internasional dikonstruksi secara sosial oleh adanya ide dan hal-hal non-material (Wendt, 1999:1).

Dalam buku Judith Goldstein dan Robert O. Keohane berjudul *Ideas and Foreign Policy: An Analytical Framework*, dijelaskan bahwa gagasan merupakan sebuah kepercayaan yang dipegang oleh individu dan dapat menjadi salah satu faktor pendorong kebijakan luar negeri (Goldstein & Keohane, 1993:3). Ide mendorong pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan tertentu dengan alasan yang jelas (Campbell, 1998:380).

Ide dan gagasan memiliki definisi dan lingkupan yang luas. Dengan begitu, definisi dari ide dan gagasan dikelompokkan dalam level, tipe dan kontennya (Legro, 2005:4). Dalam dimensi level, gagasan nasional dapat dikelompokkan dari beberapa sumber yaitu refleksi dari pengambilan keputusan, identitas atau properti yang dimiliki negara, dan gabungan dari gagasan individu yang kemudian membentuk kebijakan suatu negara (Legro, 2005:4). Dari dimensi tipe, ide kolektif dibagi menjadi beberapa jenis yaitu, identitas, kepentingan, prinsip etika dan moral, serta cara memandang dunia luar (Legro, 2005:7). Sedangkan, dalam dimensi konten, gagasan berkaitan dengan beberapa spektrum level analisis seperti sistemik vs. nasional, beragam isu seperti ekonomi dan kebijakan luar negeri, dan jenis cakupan level analisis yaitu regional atau global (Legro, 2005:8).

Sedangkan, keyakinan atau *belief* memiliki beberapa tipe yaitu, cara memandang dunia luar (*world view*), cara memandang sesuatu sesuai dengan standar normatif (*principal belief*), dan yang terakhir adalah keyakinan terhadap sesuatu yang memiliki dampak sebab-akibat (*causal belief*) (Goldstein & Keohane, 1993:10). Lebih jelasnya, cara memandang dunia luar atau *world view*

berkaitan dengan pengaruh budaya dan identitas aktor dalam menginterpretasikan fenomena (Goldstein & Keohane, 1993:10). *Principal belief* berkaitan dengan pandangan normatif aktor atas apa yang benar dan salah (Goldstein & Keohane, 1993:10). Sedangkan, *causal belief* didefinisikan sebagai pandangan aktor mengenai hubungan sebab-akibat suatu fenomena yang merupakan hasil dari konsensus para ahli dan elit (Goldstein & Keohane, 1993:11). Adanya tiga tipe dari keyakinan tersebut kemudian dapat mempengaruhi produk kebijakan luar negeri dalam beberapa mekanisme perubahan yaitu *Road Maps*, *Focal Points* dan *Institutionalization*.

Dalam tulisannya, Goldstein dan Keohane menjelaskan bahwa *Road Map* merupakan sebuah strategi yang muncul untuk mencapai tujuan tertentu dalam kondisi yang penuh ketidakpastian di politik internasional (Goldstein & Keohane, 1993:16). Dalam hal ini, ide menjadi pedoman bagi aktor untuk mencapai tujuannya. Sedangkan, *Focal Points* berarti adanya ide atau gagasan berperan untuk mempersatukan aktor-aktor internasional yang terlibat dalam kaitannya dengan resolusi konflik (Goldstein & Keohane, 1993:17). Ide menjadi solusi dari masalah yang menghasilkan pemahaman bersama dan perilaku kolektif para aktor. Terakhir, *institutionalization* dimana ide dapat berpengaruh apabila dilembagakan dan ada aturan yang menetapkan mengenai gagasan tersebut (Goldstein & Keohane, 1993:20). Ide yang dilembagakan akan sangat mempengaruhi struktur politik dan kelembagaan sehingga menghasilkan kebijakan tertentu. Konsep dan mekanisme ini digunakan untuk menganalisa

perubahan kebijakan luar negeri menggunakan kerangka teori peran ide dan gagasan.

## **1.6 Operasionalisasi Konsep**

Tulisan ini akan memuat beberapa konsep yaitu:

### **1.6.1 Perubahan Kebijakan Luar Negeri**

Kebijakan luar negeri merupakan suatu fenomena yang kompleks sehingga ada banyak sekali definisi terkait dengan hal ini. Menurut Modelski, kebijakan luar negeri merupakan sebuah sistem atau aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan internasional (Modelski, 1962:6). Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Dugis, Modelski mengungkapkan bahwa dalam pembuatan kebijakan luar negeri ada beberapa konsep dasar, yaitu: pembuat kebijakan, tujuan, prinsip, daya implementasi, dan yang terakhir adalah konteks atau subjek kebijakan luar negeri tersebut diimplementasikan (Dugis, 2008:102).

Perubahan kebijakan luar negeri merupakan hal yang lumrah terjadi. Kebijakan luar negeri dan sistem internasional saling memiliki keterikatan dalam perubahan kebijakan luar negeri. Dalam memahami konsep ini, perlu untuk mengetahui bahwa pada dasarnya kebijakan luar negeri merupakan suatu tujuan atau program yang dibuat oleh negara untuk entitas atau subjek yang ada di luar negara tersebut (Hermann, 1990:5). Sehingga perubahan kebijakan luar negeri sangat mungkin terjadi bergantung pada siapa pembuat kebijakannya, apa tujuan yang ingin dicapai ataupun bagaimana kondisi internasional yang membuat negara harus menyesuaikan diri dalam lingkungan internasional.

Istilah kebijakan luar negeri memiliki definisi yang beragam dari para cendekiawan. Hermann mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai tindakan yang dihasilkan dari keputusan politik yaitu perilaku dari negara tersebut (Alieu, 2018:1).

Selain itu, kebijakan luar negeri juga didefinisikan sebagai seperangkat aksi atau aturan tindakan yang dilakukan oleh otoritas dalam lingkungan internasional (Morin & Paquin, 2018:3). Dalam hal ini, aturan dan tindakan yang dilakukan oleh otoritas tersebut mewakili sebuah negara yang berdaulat. Bahkan, menurut Joseph Frankel, kebijakan luar negeri merupakan sebuah tindakan dan keputusan yang melibatkan aktor dan lingkungannya melalui hubungan negara satu dengan yang lainnya (Frankel, 1957:1-2). Dapat disimpulkan bahwa poin terpenting dalam kebijakan luar negeri adalah aktor, tindakan, lingkungan internasional, dan hubungan antara dua negara atau lebih. Dengan kata lain, kebijakan luar negeri merupakan segala tindakan dan keputusan negara yang berkaitan dengan lingkungan dan aktor di luar batas negara itu sendiri.

Dalam hal ini, kondisi perubahan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh faktor domestik dan politik internasional yang disalurkan oleh struktur pemerintahan dimana di dalamnya ada otoritas yang mampu mengerahkan sumber daya masyarakat (M. G. Hermann & Hermann, 1989:362). Menurut James N. Rosenau, produk kebijakan luar negeri termasuk perubahannya adalah hasil dari perubahan atau fenomena yang terjadi dari kondisi internal dan eksternal suatu negara (Rosenau, 1974:47). Negara akan selalu beradaptasi sesuai dengan kondisi internal

dan eksternalnya sehingga perubahan orientasi kebijakan luar negeri sangat memungkinkan untuk terjadi.

### 1.6.2 Gagasan

Ide dan gagasan memiliki definisi dan lingkupan yang luas. Dengan begitu, definisi dari ide dan gagasan dikelompokkan dalam level, tipe dan kontennya (Legro, 2005:4). Dalam dimensi level, gagasan nasional dapat dikelompokkan dari beberapa sumber yaitu refleksi dari pengambilan keputusan, identitas atau properti yang dimiliki negara, dan gabungan-gabungan dari gagasan individu yang kemudian membentuk kebijakan nasional suatu negara (Legro, 2005:4). Dari dimensi tipe, ide kolektif dibagi menjadi beberapa jenis yaitu, identitas, kepentingan, prinsip etika dan moral, serta cara memandang dunia luar (Legro, 2005:7). Sedangkan, dalam dimensi konten, gagasan berkaitan dengan beberapa spektrum level analisis seperti sistemik vs. nasional, beragam isu (seperti ekonomi dan kebijakan luar negeri), dan jenis cakupan level analisis yaitu regional atau global (Legro, 2005:8).

Sedangkan, keyakinan atau *belief* memiliki beberapa tipe yaitu, cara memandang dunia luar (*world view*), cara memandang sesuatu sesuai dengan standar normatif (*principal belief*), dan yang terakhir adalah keyakinan terhadap sesuatu yang memiliki dampak sebab-akibat (*causal belief*) (Goldstein & Keohane, 1993:10). Adanya tiga tipe dari keyakinan tersebut kemudian dapat mempengaruhi produk kebijakan luar negeri dalam beberapa mekanisme perubahan yaitu *Road Maps*, *Focal Points* dan *Institutionalization*.

## **1.7 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis utama dari penelitian ini adalah perubahan kebijakan luar negeri Selandia Baru menjadi lebih aktif di isu krisis perubahan iklim disebabkan oleh gagasan dan ide dalam rezim pemerintahan Jacinda Ardern. Dalam hal ini, Jacinda Ardern memiliki *principled belief* yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Selandia Baru menggunakan mekanisme kebijakan *Road Map*. Jacinda Ardern melihat isu lingkungan sebagai isu krusial yang merupakan ancaman global sehingga diperlukan peran aktif Selandia Baru sebagai tetangga dan keluarga dari negara-negara di Pasifik Selatan dalam mengatasi masalah tersebut. Pemikiran tersebut membantu Ardern dalam merumuskan kebijakannya dan berperan aktif dalam isu perubahan iklim di Pasifik Selatan.

## **1.8 Metode Penelitian**

Guna membuat penelitian ini menjadi terstruktur dan terarah, maka tulisan ini memiliki metode penelitian yang akan dijabarkan sebagai berikut:

### **1.8.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan tipe eksplanatif yang berusaha untuk menjelaskan penyebab di balik peran aktif Selandia Baru dalam isu krisis perubahan iklim di Pasifik Selatan pada masa pemerintahan Perdana Menteri Jacinda Ardern. Adapun penelitian kualitatif adalah penelitian penelitian yang berusaha untuk mencari sebab dan akibat dari suatu fenomena tertentu (Hancock et al., 2009:11)

### **1.8.2 Situs Penelitian**

Peneliti melakukan penelitian di Kota Semarang, Jawa Tengah dan Kota Brighton, Inggris.

### **1.8.3 Subjek Penelitian**

Subjek dari penelitian ini adalah Perdana Menteri Jacinda Ardern selaku pembuat kebijakan Selandia Baru terkait dengan peran aktifnya dalam isu krisis perubahan iklim di Pasifik Selatan. Ardern menjadi subjek penelitian untuk melihat bagaimana peran ide dan gagasan Ardern dalam membentuk kebijakan perubahan iklim di wilayah Pasifik Selatan.

### **1.8.4 Jenis Data**

Data yang diambil untuk menganalisis merupakan jenis data sekunder dan. Data sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya untuk tujuan peneliti tersebut (Hox & Boeije, 2005:596). Artinya, data ini merupakan data tangan kedua dari publikasi yang sudah ada. Data sekunder didapatkan dari jurnal, media, wawancara media, yang membahas mengenai peran aktif Selandia Baru mengenai kebijakan krisis perubahan iklim di Pasifik Selatan. Data sekunder yang akan dikumpulkan juga berasal dari *press release*, pidato, serta pernyataan di media sosial terkait dengan peran aktif Selandian Baru dalam isu krisis perubahan iklim di Pasifik Selatan.

### **1.8.5 Sumber Data**

Data dikumpulkan dari beberapa situs seperti Youtube, situs resmi pemerintah Selandia Baru seperti Kementerian Perubahan Iklim serta Kementerian Luar Negeri

dan Perdagangan. Sumber lain diambil dari buku biografi Jacinda Ardern yaitu *Jacinda Ardern: The Story Behind an Extraordinary Leader* dan *Jacinda Ardern: A New Kind of Leader*, serta media-media Selandia Baru seperti *newsroom*, *RNZ*, *Stuff*, *Newshub*, *The Guardian*, *The Diplomat* dan *Time*. Selain itu, untuk studi literatur dilakukan dengan mengkaji penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan peran Selandia Baru dalam krisis perubahan Iklim di Pasifik Selatan, kepemimpinan Jacinda Ardern, serta penelitian lainnya yang berkaitan dengan krisis perubahan iklim di Pasifik Selatan.

#### **1.8.6 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan *desk research* atau riset pustaka yaitu studi literatur dan studi arsip. Riset pustaka merupakan teknik pengumpulan data dimana penelitian dilakukan tanpa turun ke lapangan (Hague, 2006:59). Dalam mengumpulkan data, peneliti akan meneliti literatur atau penelitian sebelumnya terkait dengan kebijakan Selandia Baru terhadap isu krisis perubahan iklim. Selain itu, peneliti akan meneliti arsip, dan juga publikasi-publikasi di internet.

Dalam melakukan penelitian, penulis akan mengumpulkan data yang mendukung hipotesa dan juga topik penelitian (*decontextualization*). Dekontekstualisasi adalah proses pengumpulan data yang diambil oleh peneliti dan pembuatan label-label atau kode untuk memudahkan klasifikasi data (Mannheimer et al., 2019:11). Setelah data atau konten terkumpul, penulis akan memilah mana data yang sesuai dan relevan (*recontextualization*) (Bengtsson, 2016:12). Kemudian dalam menganalisis konten, data dikelompokkan sesuai dengan periode, yaitu 2017 saat awal pemerintahan Jacinda Ardern sampai dengan tahun 2021 untuk melihat

perkembangan kebijakannya. Data yang sudah dipilah akan dianalisis kemudian dibandingkan untuk mencari sebab akibat sesuai dengan teori peran gagasan dalam kebijakan luar negeri.

### **1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Proses menganalisis data dilakukan dengan metode analisis *content analysis* atau analisis konten dan metode analisis kongruen. Penulis akan menganalisis konten untuk menguji kebenaran premis dari teori yang digunakan. Dalam menggunakan teori perubahan kebijakan luar negeri, maka penulis mengumpulkan data menggunakan metode analisis analisis konten (*content analysis*). Metode analisis konten dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk kata-kata yang kemudian diinterpretasikan oleh peneliti. Peneliti mencoba untuk merefleksikan pernyataan dari informan tentang suatu subjek (Bengtsson, 2016:10). Analisis konten bertujuan untuk meneliti gagasan Jacinda Ardern terkait dengan peran Selandia Baru terhadap isu perubahan di Pasifik Selatan. Dalam menganalisis konten, penulis akan mengumpulkan sumber dari media berita, wawancara media, video, maupun pidato yang dilakukan oleh pembuat kebijakan utamanya terkait dengan isu perubahan iklim di Selandia Baru dan peran aktifnya di Pasifik Selatan.

Sedangkan, metode analisis kongruen digunakan untuk menjelaskan mekanisme kebijakan apa yang diadopsi oleh Jacinda Ardern untuk membentuk kebijakan luar negeri di Pasifik Seelatan. Metode analisis data kongruen adalah metode analisis dimana peneliti memberikan data-data empiris yang relevan untuk membuktikan kebenaran teori (Blatter & Haverland, 2012:144). Penulis akan

mengumpulkan jurnal-jurnal dan publikasi yang mendukung teori untuk menjelaskan mekanisme kebijakan perubahan iklim Selandia Baru di Pasifik Selatan.

Strategi penelitian yang akan penulis gunakan adalah dengan *manifest analysis*. Adapun *manifest analysis* adalah strategi penelitian dalam analisis konten dimana peneliti menginterpretasikan kata-kata apa yang sebenarnya disampaikan oleh informan tanpa menafsirkan makna terselubung dibalikinya (Bengtsson, 2016:9). Strategi ini digunakan guna mengungkap makna narasi yang tidak tersirat.

Selain itu, penulis juga akan menganalisis dua tipe data yaitu verbal dan non-verbal. Verbal dalam bentuk pidato dan wawancara para pembuat kebijakan di Selandia Baru terkait dengan isu pengungsi perubahan iklim. Sedangkan non-verbal dalam bentuk *press release*, pidato tertulis, pendapat di media sosial, biografi Jacinda Ardern maupun statemen tertulis.